

REGULASI DAN KEBIJAKAN MEDIA CETAK DI INDONESIA MASA ZAMAN PENJAJAH

Erman Anom

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang – Kebon Jeruk Jakarta
anoem2001@yahoo.com

Abstrak

Penelitian regulasi dan kebijakan Media Cetak Indonesia di zaman penjajah ini menelusuri atau meneroka latar belakang dan coba memperlihatkan suasana pembangunan media di Indonesia. Tujuannya untuk melihat bagaimana persekitaran politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia mempengaruhi arah perkembangan media. Objektif kajian ini adalah mengenai perkembangan media dalam era kerajaan kolonial Belanda, Jepun, era perjuangan kaum nasionalis. Dalam pendekatan penyelidikan kualitatif untuk penyelidikan ini, penulis menggunakan metode: Wawancara mendalam dan analisis dokumen. Dalam penelitian wawancara, pengkaji wawancara dilakukan dengan pimpinan redaksi dan pejabat Kementerian Penerangan Republik Indonesia dan tokoh-tokoh politik. Hasil penelitian didapatkan Pada dasarnya yang dilakukan kerajaan penjajah terhadap pers nyatalah betapa kewenangan penguasa untuk memberikan dan menamatkan izin terbit pers merupakan salah satu ciri yang menonjol.

Kata kunci: regulasi, kebijakan, media cetak

Pendahuluan

Penelitian ini menelusuri atau meneroka latar belakang dan coba memperlihatkan suasana pembangunan media di Indonesia. Tujuannya untuk melihat bagaimana lingkungan politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia mempengaruhi arah perkembangan media. Objektif kajian ini adalah mengenai regulasi dan kebijakan media dalam era kerajaan kolonial Belanda, Jepun, era perjuangan kaum nasionalis.

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan Bagaimana proses pembentukan sistem media cetak dalam era kepemimpinan zaman Belanda, Jepang, dan era kaum Nasionalis? Dan Bagaimana kebijakan dan peraturan yang terbentuk?

Dalam melakukan tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, seperti di mana data yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan fenomena yang menjadi dasar penelitian tersebut. Teknik pengpenelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kegiatan media di Indonesia.

Dalam pendekatan penyelidikan kualitatif untuk penyelidikan ini, penulis menggunakan metode: Wawancara mendalam dan analisis dokumen. Dalam penelitian wawancara, pengkaji wawancara dilakukan dengan pimpinan redaksi dan pejabat Kementerian Penerangan Republik Indonesia dan tokoh-tokoh politik.

Teori

Iain Mclean(1996:218) pada dasarnya, hegemoni berasal daripada perkataan Greek yaitu hegemon yang bermaksud chieftain (ketua bagi sesuatu kaum atau kumpulan). Hotman M. Siahian (2001:94), hegemoni ialah penolakan daya pikiran kritis

masyarakat oleh penguasa(pemegang otoritas kekuasaan sipil, militer, intelektual, ideologi maupu agama) untuk mempertahankan kekuasaannya melalui wacana bahasa secara sistematis, terarah dan berkelanjutan, sehingga rakyat menerima sebuah ide, gagasan rezim secara suka rela.

William I. Robinson (1996:21), mengatakan teori Gramsci tentang pengertian hegemoni dikaitkan dengan konsep hubungan antara kelas-kelas masyarakat tertentu, yaitu kelas-kelas yang lebih dominan akan memonopoli kelas-kelas masyarakat yang lain dari segi ekonomi, budaya dan moral. Kelas-kelas masyarakat yang lain ini pula akan memberikan persetujuan secara spontan tanpa tekanan atau paksaan kepada pengaruh hegemoni kelas dominan. Ini karena, kelas-kelas dominan ini ialah kuasa hegemoni yang mampu mengontrol dan mempengaruhi sesuatu kelas atau perkumpulan tertentu. Dengan kata lain, Gramsci melihat hegemoni sebuah konsep yang menggambarkan suatu hubungan yang bersifat monopoli dan dominasi antara kelas-kelas masyarakat atasan dan bawahan dalam sebuah negara bangsa.

Stephen Gill (1990:63) berpendapat bahwa kuasa hegemoni adalah sebuah kuasa yang dominan dalam sebuah sistem pemerintahan antara negara-negara dan mempunyai kemampuan yang tidak setanding dengan negara-negara yang lain dari segi industri senjata dan sektor perekonomian. Menurut Gill lagi, kuasa hegemoni sebagai suatu yang berkait rapat dengan tindakan dan sesuatu yang baik diukur secara empirikal. Dengan kata lain, Gill mentafsirkan kuasa hegemoni sebagai sebuah negara yang memiliki keunggulan dari segi ekonomi dan ketenteraan yang sudah pasti melaksanakan unsur-unsur dominasi dan

monopoli yaitu samalah seperti seorang pedagang monopoli yang menguasai pasaran yang kecil.

Rogers Simon (2000:20), Gramsci menggunakan kata *dirisione* (kepemimpinan, pengarahan) secara bergantian dengan *egemonia* (hegemoni) dan *berlawanan* dengan *dominasiona* (dominan). Penggunaan kata hegemoni dalam pengertian Gramsci harus dibedakan dari makna asalnya dalam bahasa Yunani, yaitu penguasaan satu bangsa terhadap bangsa lain. Istilah hegemoni pertama kali dipakai oleh Plekhanov pada tahun 1880-an untuk menunjukkan perlunya kelas pekerja untuk membangun gabungan dengan petani dengan tujuan meruntuhkan rezim tirani.

Antonio Gramsci yang dikutip dalam tulisan Sejarah dan budaya terjemahan *The Prison Notebooks* (2000), memakai istilah hegemoni untuk menyebut ideologi penguasa. Teori hegemoni kurang memusatkan perhatian pada faktor ekonomi dan struktur ideologi yang mengunggulkan kelas tertentu, tetapi lebih menekankan ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan, dan mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para korbannya, sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Menurut Gramsci, kekuasaan yang langgeng memerlukan sistem kerja berupa tindakan kekerasan yang bersifat memaksa dan bersifat lunak, membujuk. Untuk melestarikan kekuasaan, dominasi harus dilengkapi dan lama kelamaan digantikan oleh hegemoni. Fungsi hegemoni adalah mensahkan penguasa dan segala ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kekuasaan itu. Bila hegemoni tercapai, penguasa tidak perlu terus-menerus menindas karena yang tertindas menerima pada status quo. Mereka terbujuk untuk tidak lagi melihat adanya ketimpangan yang merugikan mereka sendiri, atau melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan adil dan sesuai dengan kehendak Ilahi. Gramsci juga mengatakan hegemoni dapat terbentuk lewat berbagai cara dan berbagai wilayah kehidupan sehari-hari yang seakan tidak serius, tidak angker, tidak bersifat politis. Antonio Gramsci (dalam Eriyanto 2001:103), berpendapat bahwa kekuatan dominasi kapitalis tidak hanya melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan relasi produksi, tetapi juga kekuatan dan hegemoni. Gramsci membangun suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. Media dapat menjadi alat di mana satu kelompok mengukuhkan kedudukannya dan merendahkan kelompok lain.

Raymond William (dalam Arthur Arsa Berger 1991: 49), mengatakan hegemoni bekerja melalui dua saluran : ideologi dan budaya melalui mana nilai-nilai itu bekerja. Melalui hegemoni, ideologi kelompok dominan dapat disebarkan, nilai dan

kepercayaan dapat ditularkan. Akan tetapi, berbeda dengan manipulasi atau indoktrinasi, hegemoni justru terlihat wajar, orang menerima sebagai kewajaran dan sukarela.

Ariel Heryanto (1999), Hegemoni Kekuasaan Versi Gramsci mengatakan hegemoni memberi toleransi bagi perbedaan dan bahkan perlawanan, hingga batas tertentu, sejauh dalam kendali sang penguasa. Dengan demikian, kaum tertindas diharapkan merasa senang dan berharap ada perbaikan walau masih dikuasai. Hegemoni bukan saja bersifat mengalah terhadap tuntutan musuh, tetapi juga menahan diri untuk tidak semata-mata memperjuangkan kepentingan sendiri secara vulgar. Yang dibutuhkan adalah kemasam . Kepentingan sendiri dibungkus dengan aneka kepentingan lain, sehingga tampil seakan mewakili kepentingan awam.

Dalam tulisan *Catatan-Catan Politik* (2001), Gramsci mengatakan hegemoni adalah suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan pembujukan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologi. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus/kasusepakatan. Gramsci menolak ekonomisme, dan besikukuh adanya kemandirian ideologi dari determinisme ekonomi dan media massa dalam artian sebagai satu medan perjuangan ideologi, adalah salah satu pengaruh dari pandangan Gramsci. Titik berdiri Gramsci yang menolak ekonomisme muncul lantaran ia memandang perjuangan membangun suatu hegemoni ideologis adalah faktor utama dalam perubahan radikal.

Fiske (1992:291), mengatakan hegemoni selalu memposisikan kontradiksi terus menerus antara ideologi dan pengalaman sosial kaum tertindas yang membuat hal itu selalu menjadi medan perjuangan ideologis. Lenin, oleh Roger Simon (2000:21), mengatakan hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota – anggotanya untuk memperoleh dukungan dari mayoritas.

Pembahasan

Era Penjajahan Belanda

Pada mulanya kerajaan kolonial Belanda menerbitkan akhbar berbahasa Belanda. Kemudian masyarakat Indo Raya dan Cina juga menerbitkan akhbar dalam bahasa Belanda dan Cina juga bahasa daerah. Saat itu orang Indonesia belum memperoleh tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang memadai, sehingga mustahil untuk berkemampuan menerbitkan akhbarnya sendiri. Percobaan pertama untuk memulai ialah pada masa Gubernur Jeneral Van Imhoff, yang pada tahun 1774 menerbitkan *Bataviasche Nouvelles*, tetapi hanya hidup untuk dua tahun (Wijnmalen 1874:jilid 3, bagian 2).

Dalam temubual dengan Leo Batubara (2005), beliau mengatakan pada 20 June 1774 akhbar pertama di nusantara ini, yaitu *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen* (Berita dan Penalaran Politik Batavia) telah diterbitkan. Edisi pertama beredar pada 7 Ogos 1774. Dua tahun kemudian akhbar ini dilarang terbit. Akhbar berbahasa Melayu tertua adalah Bintang Surabaya (1861) dan *Pewartar Soerabaya* (1902). Komentar Leo Batubara dapat diutarakan seperti berikut:

“...media pertama di nusantara ini *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen*... surat kabar bahasa Melayu tertua adalah *Bintang Surabaya* (1865)... orang-orang pergerakan dan perslah yang berjasa menumbuh-kembangkan konsep Indonesia...”

Menurut Atmadi (1982:8) pada masa kolonial Belanda penerbitan akhbar di Indonesia (the *Nederdland East Indies*) yang pertama ialah “*Bataviaasche nouvelles en Politique Raisonnementen*” diterbitkan dalam tahun 1774. Akhbar tersebut diterbitkan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia menentang polisi kerajaan penjajah, dan akhbar tersebut juga merupakan suatu kuasa yang kuat dalam menentang polisi pemerintah Belanda ketika itu.

Pada awal abad ke-19 muncul *Bataviasche Kolonial Courant*, yang kemudian pada masa kerajaan Inggris diganti dengan akhbar berbahasa Inggris, *Java Government Gazette*. Setelah daerah koloni Inggris dikembalikan kepada Belanda, akhbar itu diteruskan dengan nama *Javasche Courant*, yang tetap membawa suara kerajaan Hindia Belanda. Pada tahun 1848, seorang mubaligh Kristen Van Hoevell, membuat pejabat-pejabat kerajaan terperanjat, kerana dalam usahanya mengadakan pembaruan ia mencantumkan kebebasan akhbar sebagai hal pertama dan penting dalam programnya (Dekker 1909:261).

Dalam perkembangan selanjutnya, akhbar pada era kerajaan Belanda mengalami rintangan dan halangan penumbuhannya. Mengikuti Edward C. Smith (1969:61), kerajaan mengadakan pengawasan keatas akhbar Indonesia, dan Cina, atau Belanda. Satu undang-undang jenayah Belanda telah ditetapkan iaitu dengan mengenakan hukuman berat terhadap penyiaran dengan kata-kata, surat atau gambar, secara langsung atau tidak langsung, secara terbuka atau sembunyi-sembunyi, gagasan yang bertujuan mengacaukan ketertiban dan ketenteraman dan mendesak kejatuhan kerajaan Hindia Belanda, atau secara terang-terangan melahirkan rasa permusuhan, kebencian, atau kritik terhadap kerajaan. Undang-undang kawalan akhbar pada tahun 1931 telah memberikan kekuasaan mutlak kepada kerajaan untuk menutup sementara waktu penerbitan akhbar, tanpa proses undang-undang, demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Swantoro dan Atmakusumah (2002:172), pada 7 September 1931

kerajaan kolonial Belanda telah memperkenalkan *Persbreidel Ordonnantie* (Ordinan Akhbar). Di bawah ordinan ini Gabenor Jeneral diberi hak untuk melarang penerbitan tertentu yang dinilainya dapat mengganggu ketenteraman awam.

Pada zaman Hindia Belanda, peraturan mengenai akhbar dimuatkan dalam Undang-Undang tahun 1856 mengenai barang-barang cetak dan diubah suai pada tahun 1906. Perbezaan antara kedua undang-undang ialah: yang pertama bersifat pengawasan dan pencegahan, sedangkan yang kedua bersifat pengawasan penindasan (Abd. Surjomihardjo 2002:12-13). Dalam RR 1856 (KB 8 April 1856 Ind.Stb.no.74) antara lain menyebut: Semua karya cetak sebelum diterbitkan, satu naskah harus dikirimkan dulu kepada ketua pemerintahan setempat yakni pejabat keadilan. Pengiriman ini harus dilakukan oleh pihak pencetak atau penerbitnya dengan ditandatangani. Selanjutnya pindaan yang dilakukan pada tahun 1906 (KB 19 Mac 1906 Ind.Stb No.270) telah menetapkan bahawa dihapusnya ketentuan undang-undang yang bersifat pencegahan, sehingga penyerahan naskah kepada pejabat-pejabat tersebut dilakukan dalam tempoh 24 jam setelah barang cetakan itu diedarkan.

Walaupun kerajaan kolonial Belanda tentu memanfaatkan akhbar untuk matlamat-malimat kolonial, tetapi pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia tidak patah semangat menyalurkan aspirasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui akhbar. Akhbar perjuangan merupakan alat yang ditakuti kerajaan kolonial Belanda sehingga kawalan terhadap akhbar itu dilakukan cukup ketat (Janner Sinaga 1989:8).

Selain itu, Mirjam Maters (2003) telah memerihalkan, menganalisis, dan menyimpulkan dasar penguasa kolonial Belanda secara komprehensif. Dasar akhbar yang diteliti dalam tempoh 1906-1942 ini terbahagi ke dalam lima period. Setiap period menjelaskan setiap dasar yang dikeluarkan mengikut latar belakang yang menyertai dan mendasarinya. Pada tempoh 1906-1913 ini akhbar benar-benar bebas, dan ditandai dengan penghapusan penapisan pencegahan terhadap barang cetakan. Pemerintah kolonial Belanda juga mendukung pertumbuhan akhbar yang dapat memajukan penduduk pribumi. Pada masa ini setiap orang bebas menerbitkan media cetak sehingga lesen penerbitan bahkan diurus kemudian, selambat-lambatnya 24 jam setelah terbit. Pemerintah juga diletakkan sebagai lembaga penyelaras dan bukan lembaga kawalan. Untuk penyelaras akhbar, Gabornur Jeneral memberikan penerangan dan memberikan bantuan modal. Justeru pada tahun 1913-1918 adalah saatnya wujud ketelusan akhbar bebas. Penduduk pribumi benar-benar mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk memberikan idea yang berpengaruh pada bidang politik. Setelah terbentuknya Dewan Rakyat (Volksraad), akhbar sangat bebas dalam memuat perdebatan-perdebatan para elit politik. Pada

tahun 1918-1927, tempoh ini adalah awal kemunduran bagi akhbar pribumi. Penguasa kolonial banyak membatasi akhbar, khususnya akhbar radikal seiring dengan bangkitnya nasionalisme penduduk pribumi yang diwujudkan dengan berdirinya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan politik yang radikal pula. Puncaknya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di sejumlah negeri yang berhasil ditewaskan tentera kolonial Belanda.

Pada period ini pemerintah kolonial mulai memakai Kitab Undang-Undang Pidana (Sivil/Jenayah). Di dalamnya terdapat undang-undang pidana akhbar dan yang paling ditakuti adalah fasal 154-157 tentang perkara penyebaran kebencian (haatzaai artikelen), serta Pasal 207-208 tentang perkara terhadap kekuasaan negara. Satu tahun kemudian, puluhan wartawan dimasukkan ke penjara kerana menulis berita yang tidak sesuai dengan polisi kerajaan kolonial. Pada tahun 1927-1931 adalah era penerapan ordinan penamatan lesen akhbar. Kerajaan tanpa melalui pembicaraan dimakamah dapat melarang sementara terbitan berkala setelah diberikan peringatan. Dalam aturan ini, Gabornur Jeneral boleh menamatkan lesen akhbar dengan alasan “mengganggu keselamatan umum”. Masa penamatan lesen selamalamanya lapan hari, dan jika masih membangkang dipanjangkan 30 hari. Pada tahun 1931-1942 adalah kemucaknya penamatan lesen akhbar yang ditandai dengan penamatan lesen sejumlah media. Pada masa ini penguasa kolonial sudah berhasil menguasai dasar kawalan akhbar secara pentadbiran, hukum, sosial, dan ekonomi. Dasar akhbar kerajaan kolonial Belanda berakhir setelah Jepun tiba di Indonesia pada 1942.

Dasar kawalan akhbar Belanda yang bermula dengan lembut seperti kewajipan melaporkan pendirian perusahaan sehingga yang keras seperti penamatan lesen tidak dapat dilepaskan dari sejarah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Akhirnya, dasar itu dikanunkan di tanah jajahannya yang terkandung dalam *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Wetboek van Strafrech) pada tahun 1918. Selain itu, pemerintah kolonial membuat dasar membatasi ruang pergerakan akhbar terbahagi ke dalam berbagai bentuk atau saranan, iaitu saranan hukum yang berupa penapisan pencegahan, ketentuan pidana yang menindas, dan kewajipan tutup mulut bagi kakitangan kerajaan; dalam bentuk lingkungan pentadbiran seperti sistem lesen dipersukar, sistem deposit, dan lesen atau rekondansi; saranan-saranan ekonomi berupa pengutipan cukai atas kertas dan iklan, serta modal minimal penumbuhan sebuah syarikat akhbar; saranan-saranan sosial, dengan peringatan, propaganda, dan kawalan terhadap isi berita.

Pada asasnya, dasar yang dilakukan kerajaan terhadap akhbar di zaman kolonial Belanda, nyatalah betapa wewenang penguasa untuk menamatkan lesen akhbar merupakan salah satu ciri yang menonjol. Alasan dari wewenang itu adalah untuk menjaga

keselamatan umum, dengan menggunakan Undang-undang 1856 yang sifatnya pencegahan, Undang-undang 1906 yang bersifat penindasan, dan Undang-undang Ordinan 1931 iaitu tentang penarikan balik surat izin akhbar dan wajib melaporkan jumlah barang cetakan akhbar.

Era Pendudukan Jepun

Sewaktu era pendudukan Jepun, situasi politik Indonesia mengalami perubahan yang menyeluruh. Dalam era ini, akhbar di Indonesia digunakan sebagai alat mobilisasi massa untuk mencapai matlamat Jepun. Pada era ini akhbar Indonesia mengalami kemajuan dari segi teknikal, namun lesen penerbitan akhbar sebagai alat kawalan oleh penguasa Jepun diperkenalkan. Pada zaman pendudukan Jepun, wilayah Jawa dan Madura berada di bawah kekuasaan *Balatentera XVI*, Sumatera diserahkan kepada *Balatentera XXV*, dan wilayah lainnya (Kalimantan, Sulawesi, Maluku serta Nusa Tenggara) berada dalam kekuasaan Angkatan Laut Jepun. Penguasa Jawa-Madura mengatur alat penerbitan dan komunikasi dengan Undang-Undang No.16/1942 (Swantoro dan Atmakusumah 2002).

Undang-Undang No.16/1942 mempunyai dua fasal ialah sistem lesen terbit dan penapisan pencegahan. Fasal 1 menyatakan bahawa semua jenis barang cetakan harus memiliki lesen penerbitan. Fasal 2 melarang semua penerbitan yang sebelumnya memusuhi Jepun, untuk meneruskan penerbitannya. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi jelas bahawa penerbitan yang dilarang itu meliputi semua akhbar Belanda, akhbar Indonesia yang anti-Jepun, dan juga akhbar-akhbar berbahasa Cina yang menyerang keganasan Jepun terhadap China.

Akhbar Belanda dan Cina diambil alih oleh Jepun. Beberapa penerbitan akhbar Indonesia boleh berjalan, tetapi di bawah kawalan ketat Jepun (Edward C. Smith 1969:70). Jepun untuk kepentingan propagandanya menerbitkan beberapa akhbar, Crawford (1950:21) menyebut lima akhbar yang diterbitkan Jepun untuk Jawa: *Asia Raya* di Batavia; *Tjabaja* di Bandung; *Sinar Baru* di Semarang; *Sinar Matahari* di Yogyakarta, dan *Suara Asia* di Surabaya, dan di setiap daerah mempunyai majalah mingguan, *Syu Shinbun*. Ada satu akhbar dalam bahasa Indonesia, *Kung Yung Poa*, dan satu dalam bahasa Cina, serta majalah bergambar dalam bahasa Jepun dan Indonesia, *Djawa Baru*. Peredaran di Jawa diperkirakan 80,000 naskah untuk semua akhbar, 5,000 atau kurang untuk majalah setempat. Hal ini sama berlaku di pulau-pulau lain.

Selama pendudukan Jepun 1942-1945, kegiatan “akhbar nasional” untuk sementara hilang. Pada saat penguasa Jepun memobilisasi lebih dari 2 juta orang rakyat Indonesia untuk tujuan perang (Kimura 1989:24-25), pada Mei 1942 diciptakan pula “Undang-undang Akhbar Jepun”. Undang-undang itu

mengatur sistem perlesenan penerbitan dan penarikan balik.

Selama tiga tahun pendudukan Jepun, wartawan Indonesia melihat sendiri bagaimana Jepun menggunakan akhbar untuk memobilisasi rakyat demi kepentingan Jepun. Para wartawan juga memperoleh latihan teknik penerbitan moden. Kantor berita Jepun *Domei* memberi kesempatan kepada wartawan pengasas Antara untuk memanfaatkan kemudahan alat komunikasi baru yang tidak pernah mereka guna sebelumnya (Taufik 1977, Agassi 1969). Pada era pendudukan Jepun akhbar dilarang menggunakan bahasa Belanda dan ini mempercepat penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai gantinya, orang Indonesia terkena pengaruh mentalisasi Jepun di masa perang. Mentaliti ini kemudian memperkuat konsep negara integralistik, dalam hubungannya dengan pembangunan bangsa, serta ketidaksukaan terhadap liberalisme Barat. Kenyataan itu memainkan peranan penting dalam menentukan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (basic law). Lebih dari itu, Jepun telah meninggalkan sistem perlesenan akhbar (Hanazaki 1998:12).

Era Perjuangan Kaum Nasionalis

Era perjuangan kaum nasionalis pada awal abad ke-20 sehingga tahun 1942 berjaya melahirkan akhbar yang dibiayai, disunting, dan diterbitkan oleh kaum Indonesia. Justeru akhbar berbahasa daerah menjadi penyebar semangat nasionalisme. Para pemimpin gerakan nasionalis menjadikan akhbar sebagai semangat untuk mencapai tujuan, dan akhbar berperanan menjadi salah satu alat perjuangan mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Akhbar menyatukan perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Akhbar Indonesia menyesuaikan dengan aliran politik dan kecenderungan pada organisasinya, dan ini dapat kita lihat melalui *Sinar Djawa*, *Panjaran Warta* dan *Saroetomo* yang berada di bawah pengaruh Sarekat Islam.

Pada tahun 1901 sampai pertengahan 1920-an muncul beberapa organisasi kebangsaan Indonesia, seperti Budi Utomo (1908), Indische Partij (1911), Sarekat Islam (1921), Parti Komunis Indonesia (1920), dan Parti Nasional Indonesia (1927). Akhbar Indonesia mulai mengelompokkan diri sesuai dengan aliran politik dan kecenderungan organisasinya pada tahun 1931. *Sinar Djawa* (Semarang), *Panjaran Warta* (Betawi) dan *Saroetomo* (Surakarta) berada di bawah pengaruh Sarekat Islam. Sementara itu, sehingga akhir 1926, Parti Komunis Indonesia mempunyai lebih dari 20 penerbitan, enam di antaranya berada di Surakarta (Nugroho Notosusanto et al., 1990 vol 5:304).

Menjelang berakhir masa kekuasaan kolonial, terdapat 33 akhbar dan majalah berbahasa Indonesia, dengan naskhah keseluruhan sekitar 47,000 naskhah. Sebelas penerbitan (17,000 naskhah) dimiliki Parti Indonesia Raya (Parindra); empat penerbitan (7.500

eks) milik Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU); dan dua yang lainnya milik Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Sementara penerbitan lainnya juga bergabung dengan kelompok Nasionalis (Abdurachman Surjomihardjo dan Leo Suryadinata 1980:83-84).

Kerajaan kolonial Belanda mencuba membatasi kebangkitan gerakan nasionalis itu dengan mengeluarkan Ordinan (ordonansi) Akhbar pada 1931. Dengan peraturan itu penguasa berhak menghentikan penerbitan akhbar untuk sementara demi keselamatan umum. Impak munculnya aturan itu antara 1931-1936, tidak kurang dari 27 akhbar kaum nasionalis dimatikan lesen oleh kerajaan kolonial (Lee 1971).

Muchtar Lubis (1992) menulis bahawa etos akhbar Indonesia yang bersumber dari dalam perjuangan rakyat Indonesia telah mendorong kemajuan bangsa dan memenangkan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda yang merendahkan kemanusiaan. Sedangkan Rosihan Anwar (1992) menekankan bahawa para pemimpin pergerakan juga menjadi penulis pada penerbitan akhbar, dan mereka memainkan peranan sebagai wartawan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

Bagi para wartawan, pada tempoh masa tersebut, mencari untung bukanlah motif utamanya (Parker 1982). Namun demikian, akhbar tidak boleh sepenuhnya lepas dari pengaruh perniagaan. Kesulitan kewangan terkadang merusak citra akhbar. Salah satu contoh yang baik adalah kisah akhbar *Oetoesan Hindia*. Pada 1923, Sarekat Islam menunda mencetak akhbar tersebut kerana kesulitan kewangan, terutama setelah kerajaan kolonial melakukan pengawasan yang ketat terhadap organisasi ini. Bantuan kewangan yang diterima *Oetoesan Hindia* adalah dari kelompok Arab, tetapi, kelompok Arab tidak memberi sokongan kewangan kerana ketidakpuasan mereka terhadap garis dasar Sarekat Islam dan *Oetoesan Hindia*. Selanjutnya, akhbar itu mulai memuat iklan dari para pedagang Cina, dan tidak lama kemudian *Oetoesan Hindia* disokong oleh kewangan kaum Cina. Sarekat Islam beserta akhbarnya, yang pada mulanya merupakan organisasi anti-Cina, cenderung lebih bersahabat dengan kaum Cina dan menghentikan kegiatan anti-Cina yang pernah menjadi programnya (Neil 1984).

Setelah kemerdekaan, timbul soalan yang diakibatkan oleh terlalu mengebunya semangat kebebasan. Semangat yang menjiwai perjuangan kemerdekaan mulai luntur, terjadi persaingan keras antara kekuatan politik. Akhbar Indonesia larut dalam arus itu, dan terjadi perubahan watak dari akhbar perjuangan menjadi akhbar partisan. Akhbar sekadar menjadi corong parti politik.

Kesimpulan

Perbincangan tentang sejarah pembangunan media cetak di Indonesia telah memperlihatkan bagaimana kerajaan yang memerintah memulainya

dengan menelusuri atau meneroka latar belakang sejarah pembangunan media cetak era kolonial Belanda, Jepun, era perjuangan kaum Nasionalis. Pada era kolonial Belanda pembangunan media cetak diwujudkan untuk kepentingan dalam kegiatan perdagangan dan memerlukan penyiaran berita perdagangan dari Eropa untuk diberitakan kepada pos-pos perdagangan diberbagai pulau agar orang Belanda dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting. Dalam perkembangan selanjut pembangunan media cetak mengalami kemajuan dan menjangkau seluruh kepentingan masyarakat nusantara dan tidak hanya digunakan untuk kepentingan perdagangan tetapi juga digunakan untuk kepentingan politik dan memajukan pengetahuan bangsa terjajah. Namun situasi perkembangan ini membuat penjajah membuat rintangan dan hambatan dengan pengawasan atas akhbar Indonesia, Cina, dan Belanda dengan membuat undang-undang kriminal Belanda yang memberi hukuman berat penyiaran dengan kata-kata, surat atau gambar, secara langsung atau tidak langsung, secara terbuka atau sembunyi-sembunyi, gagasan yang bertujuan mengacaukan ketertiban dan ketenteraman dan mendesak kejatuhan kerajaan Hindia Belanda, atau secara terang-terangan melahirkan rasa permusuhan, kebencian, atau kritik terhadap kerajaan. Didapati juga pembangunan media cetak era kolonial Belanda mengalami rintangan hambatan sesuai dengan perkembangan masa. Pada dasarnya yang dilakukan kerajaan penjajah terhadap akhbar nyatalah betapa kewenangan penguasa untuk menamatkan lesen terbit akhbar merupakan salah satu ciri yang menonjol. Dan alasan dari kewenangan itu selalu untuk menjaga keselamatan umum, dengan menggunakan Undang-undang 1856 yang sifatnya pengawasan preventif, Undang-undang 1906 yang bersifat refresif, dan Undang-undang Ordonnantie 1931 tentang penamatan lesen akhbar dan wajib lapor barang cetakan akhbar. Dibawah era pendudukan Jepun, perkembangan akhbar Indonesia belajar tentang kemampuan akhbar sebagai alat mobilisasi massa untuk mencapai matlamat Jepun. Akhbar mengalami kemajuan dalam hal teknis, namun mulai diberlakukan lesen penerbitan akhbar, sebagai saranan kawal yang dilakukan penjajah Jepun dengan membuat Undang-undang No. 16.

Dari Undang-undang ini ada dua segi yang menonjol iaitu berlakunya sistem lesen terbit dan kawalan preventif. Pasal 1 menyatakan bahawa semua jenis barang cetakan harus memiliki lesen publikasi atau lesen terbit. Pasal 2 melarang semua penerbitan yang sebelumnya memusuhi Jepun, untuk meneruskan penerbitannya. Jepun melarang penerbitan akhbar Belanda, Indonesia yang anti Jepun, dan akhbar-akhbar berbahasa Cina yang menyerang agresi Jepun terhadap Tiongkok. Era perjuangan kaum nasionalis, para pemimpin gerakan nasionalis akhbar digunakan untuk mengelorakan semangat mencapai cita-cita Indonesia merdeka, akhbar menjadi salah satu alat perjuangan.

Akhbar menjadi pemersatu perjuangan dan menjadi penyebaran semangat nasionalisme. Pada kurun waktu ini, akhbar lahir yang dibiayai, disunting, diterbitkan oleh kaum Indonesia, akhbar mengelompokkan diri sesuai dengan aliran politik dan kecenderungan pada organisasinya dengan matlamat bersama mencapai Indonesia merdeka.

Daftar Pustaka

- Abdul Razak. An overview of conceptual framework. Dlm. A. Razak (pnyt). *Press laws and system Asean States*. hlm. 2. Confederation of Asean Journalists. Jakarta, 1985
- Abdul Razak. Dasar dan sistem akhbar dalam era kepemimpinan Soeharto. Temubual. 1 Juli. Jakarta, 2005
- Abdurrachman Surjomihardjo. *Beberapa segi perkembangan pers di Indonesia*. Departemen Penerangan Republik Indonesia., Jakarta, 2002
- Afan Gaffar. *Demokrasi Indonesia masa lampau, kini dan mendatang*. Surabaya: Makalah Diskusi AIPI. Surabaya, 1999
- Afan Gaffar. *Politik Indonesia transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999, Yogyakarta, 1999
- Asiah Sarji. Pengaruh persekitaran politik dan sosio budaya sistem penyiaran Malaysia dalam perkembangan penyiaran radio di Malaya dari tahun 1920-1959. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. 1996
- Atmadi, T. 1982. *Development of the Indonesian press and its system*. Jakarta: The Indonesian Press. Jakarta, 1982
- Atmakusumah Astraatmaja. Dasar dan sistem akhbar dalam era kepemimpinan Soeharto. Temubual. 25 Januari., Jakarta, 2005
- Bagdikian. *The press and its crisis of identity*. University Press of Kansas, Kansas, 1969
- Bellamy, R. *Modern Italian social theory*. From Pareto to the present, terjemahan Vedi R. Hadiz. Teori sosial modern: Perspektif Itali. LP3ES. Jakarta, 1987
- Crawford, J. *History of the Indian archipelago, Vol. II*. Edinburgh: Archibald Constable & Co. Edinburgh, 1820
- Davis, C., Back, K., & Mc Lean, K. *Oral history from tape to type*. Chicago: American Library Association.

- Dror, Y. *Public policy-making reexamined*. Chandler Publishing Company. San Fransisco, 1968
- Hachten, W.A. *World news prism*. Ames, The Iowa State University Press. Iowa, 1981
- Hancock, A. *Communication planning for development: an operational framework*. UNESCO, Paris, 1981
- Hardiman Francisco Budi. *Kritik ideologi*. Kanisius. Yogyakarta, 1989
- Harris, P.B. *Foundations of political science*. Hutchinson, London, 1976
- Hardjoprakoso. *Katalog perpustakaan musium pusat pers tahun 1810-1977*. SPS, Jakarta, 1977
- Harsono Suwardi.. *Pers dan pemilu di Indonesia: Suatu studi komunikasi politik terhadap liputan berita-berita kampanye pemilu 1987 pada 10 pers di Indonesia*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia., Jakarta, 1987.
- Indrawadi Tamin. *Development journalism: opinion from editors perspective*. Thesis Ph.D. Florida State University. Florida, 1992
- Indrawadi Tamin. *Dasar dan sistem akhbar dalam era kepemimpinan Soeharto*. Temubual. 19 May. Jakarta, 2005
- Ignatius Haryanto. *Hubungan antar Pers dan pemerintah di Indonesia : Studi kasus harian Indonesia Raya tahun 1972-1974*. BA thesis. Universitas Indonesia., 1994
- Jakob Oetama. *Perspektif pers Indonesia*. LP3ES. Gama Press. Yogyakarta, 1989
- James, C.F.W. 1994. *Indonesia and the Phlippines*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. New Jersey, 1994
- Janner Sinaga. *Peranan, fungsi dan tanggung jawab serta tantangan pers nasional dalam pembangunan dan kestabilan nasional*. Deppen R.I., Jakarta, 1989
- Kerlinger, F. N. *Foundations of behavioral research*. Holt, Rinehart and Winston. New York, 1964
- Kerlinger, F. *Foundation of behavioral research*. Holt, Rinehart and Winston., New York, 1973
- Kirk, J & Marck L. M. *Reliability and validity on qualitative research, jilid.1*. Beverly Hills: Sage Publications. Beverly Hills, 1986
- Leo Suryadinata. *Pers melayu-cina*. Sinar Harapan, Jakarta, 1971
- Leo Batubara. *Dasar dan sistem akhbar dalam era kepemimpinan Soeharto*. Temubual. 18 Mac 2005. Jakarta, 2005
- R.H. Siregar. *Dasar dan sistem akhbar dalam era kepemimpinan Soeharto*. Temubual. 20 June. Jakarta, 2005
- Smith, E. C. *A history of newspaper suppression in Indonesia: 1949-1965*. Ph.D Thesis. University of Iowa. Iowa, 1969
- Soebagijo I.N. *Sejarah pers Indonesia*. Dewan Pers. Jakarta, 1977
- Soebagijo I.N. *Jagat wartawan Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta, 1981
- Soedarjo Tjokrosisworo. *Sekilas perjuangn surat kabar*. PT. Indonesia Raya Press. Jakarta, 1958
- SPS Pusat. *Garis-garis besar perkembangan pers*. Serikat Penerbitan Surat kabar, Jakarta, 1971
- Sukarno. *Pers bebas bertanggung jawab*. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, 1986
- Surjomihardjo, Abdulrahman, & Leo Suryadinata. *"Pers di Indonesia: Ikhtisar perkembangan sampai 1945"*, Dlm. Abdurrachman Surjomihardjo (pnyt.). *Beberapa segi perkembangan sejarah pers di Indonesia*. Kementerian Penerangan. Jakarta, 1980
- Tarman Azzam. *Dasar dan sistem akhbar dalam era kepemimpinan Soeharto*. Temubual. 21 Desember. Jakarta, 2004
- Taufik. *Sejarah dan perkembangan pers di Indonesia*. Triyinc. Jakarta, 1977
- Tribuana Said. *Sejarah pers nasional dan pembangunan pers Pancasila*. CV. Haji Masagung. Jakarta, 1988
- Tribuana Said. *Dasar dan sistem akhbar dalam era kepemimpinan Soeharto*. Temubual. 28 Januari. Jakarta, 2005
- Wijmmalen, T.L.L. *Eersteling onder de Indische Nieuns bladen*. Tijdschrift voor Nederlandsche Indie. Jilid 3, bagian 2. 1874